SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 1, Nomor 2, Januari 2024, 91-100
Website: http://ejurnal.fis.ung.ac.id/index.php/sjppm/about

Persepsi Masyarakat Terkait Implementasi Penggunaan Dana Desa di Desa Monggolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo

Public Perception Regarding the Implementation of Village Fund Usage in Monggolato Village, Telaga Sub-district, Gorontalo Regency

Raihan A. Hanasi[1*)], Sahrain Bumulo[2)], Rapli Mobilingo[3)]

[13]Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
[2]Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo Indonesia
[*]*Corresponding Author: raihan@ung.ac.id*

ABSTRACT

The allocation of Village Funds to each village is a tangible manifestation of the central government's concern for rural development agendas. The primary objective of providing these funds is to enhance the well-being of the community at the village level through the implementation of various development programs tailored to local needs. However, the disbursement of village funds often sparks controversy at the local level, ranging from a lack of transparency to instances of corruption. This research aims to analyze the community's perception regarding the implementation of village fund utilization for sustainable village development. The research methodology employed is qualitative with a descriptive approach. The findings indicate that the implementation of village funds in Mongolato Village has garnered positive responses from the community. The community actively participates in monitoring the use of village funds for development, and the local government allows them to provide feedback, input, and criticism in the development planning process. The Mongolato Village government demonstrates a strong commitment to development to improve the well-being of the community, particularly farmers. In addition to road infrastructure, the village government has also executed various other development programs that have yielded positive impacts.

Keywords: Village Fund, Sustainable Development, Prosperity

ABSTRAK

Pemberian Dana Desa kepada setiap desa merupakan manifestasi nyata dari perhatian pemerintah pusat terhadap agenda pembangunan pedesaan. Tujuan utama dari pemberian dana ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa, melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, seringkali dana desa yang kucurkan menuai polemik di tingkatan lokal, mulai dari tidak adanya transparansi hingga terjadinya korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai persepsi masyarakat dalam melihat implementasi penggunaan dana desa untuk pembangunan desa yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi dana desa di Desa Mongolato menuai respon positif dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat aktif dalam mengawal penggunaan dana desa untuk pembangunan desa, bahkan masyarakat diberikan ruang oleh pemerintah desa untuk dapat

Copyright (c) 2024 Raihan A. Hanasi, Sahrain Bumulo, Rapli Mobilingo

memberikan tanggapan, masukan, dan kritikan dalam proses perencanaan pembangunan. Pemerintah Desa Mongolato memiliki komitmen yang kuat terhadap pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani. Selain infrastruktur jalan, pemerintah desa juga telah melaksanakan berbagai program pembangunan lainnya yang memberikan dampak positif.

Kata Kunci: Dana Desa, Pembangunan Berkelanjutan, Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Pemberian Dana Desa kepada setiap desa merupakan manifestasi nyata dari perhatian pemerintah pusat terhadap agenda pembangunan pedesaan. Dana Desa merupakan alokasi dana yang diberikan secara berkala kepada setiap desa di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan utama dari pemberian dana ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa, melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemerintah pusat memahami bahwa pembangunan pedesaan memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, termasuk peningkatan perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di tingkat desa. Oleh karena itu, Pemberian Dana Desa diharapkan dapat menjadi instrumen efektif untuk mendukung kemajuan dan kesetaraan pembangunan antarwilayah di seluruh Indonesia. Dengan adanya dukungan finansial ini, diharapkan setiap desa dapat mengelola dan memanfaatkan dana dengan baik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya serta mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan. Ini melibatkan usaha untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pedesaan dan seluruh masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan, yakni menciptakan kehidupan mandiri, berkembang, sejahtera, dan adil bagi penduduk pedesaan (Adisasmita 2006).

Pada konteks ini, pentingnya pembangunan desa bukan hanya sebatas peningkatan infrastruktur fisik, melainkan juga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Oleh karena itu, program pembangunan desa tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial dan ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan desa diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh komunitas desa, mengurangi disparitas antar wilayah, dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selama 70 tahun masa pembangunan di Indonesia, fokus utama pada pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan perluasan kesenjangan antar wilayah yang semakin mencolok. Investasi dan sumber daya cenderung terpusat di daerah perkotaan dan pusat pertumbuhan, sehingga terjadi eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya di wilayah Hinterland. Meskipun terjadi peningkatan dalam aspek ekonomi dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, namun tingkat kesenjangan, yang diukur melalui Gini Ratio, terus meningkat seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2011, Gini Ratio mencapai angka 0,41 menandakan tingkat ketidaksetaraan distribusi kekayaan yang signifikan. Situasi ini dipengaruhi oleh kurangnya efektivitas dari program-program penanggulangan kemiskinan dan kesulitan dalam menjangkau penduduk miskin karena adanya kendala geografis (Soleh 2017).

Memberdayakan masyarakat desa dan mengatasi kemiskinan serta kesenjangan merupakan fenomena yang semakin kompleks. Pembangunan pedesaan tidak hanya fokus pada

peningkatan produksi pertanian. Selain itu, pembangunan pedesaan juga melibatkan implementasi program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mendistribusikan uang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dasar. Upaya ini tidak hanya terbatas pada aspek tersebut, melainkan juga mencakup beragam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan yang beragam sehingga seluruh anggota masyarakat dapat menjadi mandiri, percaya diri, tidak bergantung, dan bisa lepas dari belenggu struktural yang mengakibatkan kehidupan yang sulit.

Pada konteks ini, dengan adanya regulasi yang mengatur jalannya implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, diharapkan akan membawa dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat desa, terutama dalam hal ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan desa yang berkelanjutan. Ini sejalan dengan visi Nawacita Presiden yang menekankan "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka daerah kesatuan." Pembangunan di sini diartikan sebagai upaya yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta, berlangsung secara bertahap dan saling terkait, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam dimensi materiil maupun spiritual (Afandi and Warjio 2015).

Sejalan dengan pendapat di atas, UU No. 6 Tahun 2014 membawa angin segar bagi masyakat di pedesaan, dimana dengan disahkannya UU Desa, semua desa di Indonesia akan diberikan mandat dalam mengelola dana desa secara mandiri untuk tujuan pembangunan desa secara berkelanjutan. Pada konteks ini, diharapkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi penduduk desa, terutama dalam aspek ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi Nawacita Presiden yang menekankan pentingnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka daerah kesatuan.

Dalam sebuah agenda pembangunan pedesaan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, agar pembangunan yang telah direncanakan tepat sasaran dan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Tahulending et al. (2018) menjelaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap kelancaran suatu proyek pembangunan. Karena tidak semua aspek pembangunan dapat ditetapkan semata-mata oleh pemerintah, keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor krusial dalam kesuksesan atau kegagalan suatu proyek pembangunan yang telah direncanakan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, proyek pembangunan dapat diarahkan dengan lebih baik, menunjukkan bahwa rencana atau proyek tersebut telah disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan proyek pembangunan, prioritas ditetapkan berdasarkan tingkat kepentingan masyarakat. Sebagai hasilnya, pelaksanaan proyek pembangunan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, sesuai dengan arahan yang diinginkan oleh masyarakat.

Pada konteks yang lain, perihal implementasi kebijakan pembangunan desa di tingkat lokal seringkali menuai persepsi negatif dari masyarakat, terutama terkait penggunaan dana desa yang kurang transparan, sehingga beberapa masyarakat menganggap bahwa implementasi UU Desa di tingkat lokal tidak berjalan sesuai dengan amanah yang telah ditetapkan pada saat UU ini disahkan. Sebagaimana penjelasan Tohopi et al. (2024), diketahui bahwa meskipun kebijakan publik dirancang untuk memprioritaskan kepentingan publik, implementasinya seringkali menghadapi hambatan, termasuk penolakan dari masyarakat. Dalam konteks kebijakan Dana Desa, minimnya sosialisasi dapat mengakibatkan kurangnya dukungan dari masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu memahami kondisi sosial dan nilai-nilai kultural masyarakat serta meningkatkan partisipasi dan dukungan melalui informasi yang memadai.

Berangkat dari uraian yang telah dijelaskan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana persepsi masyarakat dalam melihat implementasi penggunaan dana

desa untuk pembangunan desa yang berkelanjutan? Penelitian ini sangat penting untuk melihat tingkat pemahaman dan kepuasan masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi program pembangunan desa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana program pembangunan desa dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konstruktif bagi pihak terkait, terutama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa, sehingga dampak positifnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perbaikan kebijakan dan strategi pembangunan desa yang lebih optimal guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sebab metode kualitatif memungkinkan analisis langsung terhadap gejala sosial dalam masyarakat melalui wawancara mendalam dengan narasumber. Fokusnya bukan hanya pada justifikasi atau jumlah data yang dikumpulkan, melainkan lebih pada pemahaman ilmiah atas bentuk konkret hasil penelitian. Salim (2002) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, keterampilan kreativitas dan kemampuan improvisasi dalam melakukan wawancara sangat penting, bersama dengan sikap yang fleksibel, objektif, dan tanpa prasangka. Wawancara umumnya mencakup tiga tema utama: tingkah laku, sistem nilai, dan perasaan objek penelitian.

Metodologi penelitian melibatkan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara dengan masyarakat setempat, pemerintah desa, serta pihak terkait lainnya. Analisis data akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan pengalaman masyarakat terkait pelaksanaan penggunaan dana desa. Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait yang telah disebutkan di atas, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen yang tersedia di desa seperti RPJM Desa, RKP Desa, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

PEMBAHASAN

Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembahasan Rencana Pembangunan Desa

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menetapkan dan mempersiapkan tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Selain itu, perencanaan juga melibatkan perancangan program dan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan tersebut. Kegiatan perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan suatu kegiatan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam pelaksanaan setiap program kegiatan adalah melakukan perencanaan dengan teliti, bertujuan untuk menentukan kegiatan bersama dalam suatu organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Dalam konteks perencanaan keuangan desa, terutama dalam pengelolaan dana, diperlukan perencanaan program kegiatan yang akan dijalankan bersama dengan masyarakat desa. Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN), dan penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Oleh karena itu, perencanaan program dan kegiatannya dirancang dengan melibatkan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa, yang melibatkan BPD, LPMD, tokoh masyarakat, dan perwakilan unsur masyarakat umum.

Pembangunan desa menekankan prinsip seimbang dalam tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan fasilitas yang dibutuhkan, sementara masyarakat berperan aktif dengan partisipasi dalam pembangunan melalui inisiatif dan gotong royong. Pada era reformasi, pembangunan desa lebih difokuskan pada kebutuhan desa itu sendiri secara substansial. Pemerintah pusat dan daerah berperan sebagai fasilitator dengan memberikan dukungan dana, pembinaan, dan pengawasan. Program pembangunan desa didesain lebih berorientasi pada pendekatan bottom-up atau kombinasi dari pendekatan *top-down* dan *bottom-up* (Magal, Kawung, and Maramis 2021) : Telaumbanua & Ziliwu, 2022).

Merujuk pada hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa pada musyawarah yang dilakukan dalam hal pembahasan rencana pembangunan desa atau Musrenbang yang diikuti oleh masyarakat, masyarakat aktif dalam forum tersebut. Menurut penuturan salah satu informan, bahwa dalam setiap rapat masyarakat selalu diberi hak untuk mengajukan pendapat baik berupa saran, masukan, kritik, tanggapan, atau keluhan mengenai rencana pembangunan desa ke depan. Masyarakat diberikan kesempatan dalam merencanakan agenda pembangunan serta hal-hal yang perlu untuk diprioritaskan sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa sangatlah aktif dan inklusif.

Pada konteks ini, hasil wawancara dengan berbagai informan menegaskan bahwa musyawarah desa atau Musrenbang bukan hanya sekadar forum informasi, tetapi juga sebagai wahana bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan kontribusi mereka terhadap pembangunan desa. Hak masyarakat untuk memberikan pendapat memberikan gambaran bahwa proses pengambilan keputusan lebih bersifat demokratis, melibatkan berbagai perspektif dan kepentingan yang ada di masyarakat.

Pada saat dilaksanakannya Musrenbangdes, masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya tanpa ada intimidasi atau pembatasan. Ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Lebih lanjut, terlihat bahwa pemerintah desa memberikan ruang partisipasi yang signifikan kepada masyarakat, bukan hanya sebagai penerima informasi, melainkan sebagai pihak yang memiliki peran aktif dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan desa.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya mekanisme ini, kebijakan pembangunan desa dapat lebih tepat sasaran karena didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi riil masyarakat. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam musyawarah desa menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Pada konteks ini, Akhmad et al., (2019) menjelaskan bahwa pembangunan pedesaan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan masalah yang tengah dihadapi, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Diperlukan pemanfaatan sumber daya yang tepat guna dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk memajukan ekonomi pedesaan. Selain itu, potensi ekonomi yang ada sebaiknya dimanfaatkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapat di atas diperkuat dengan penjelasan Sembel et al. (2017), bahwa partisipasi aktif masyarakat memiliki peran krusial dalam kesuksesan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan di tingkat desa atau kelurahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga melibatkan kontribusi dari masyarakat setempat. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa menegaskan bahwa mekanisme pembangunan di

tingkat tersebut harus membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah sebagai pihak utama dan partisipasi aktif masyarakat sebagai pihak kedua.

Dengan demikian, dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kunci keberlanjutan pembangunan pedesaan adalah pengakuan terhadap masalah-masalah lokal dan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama menjadi landasan esensial untuk mencapai tujuan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting ditekankan bahwa dalam merancang kebijakan pembangunan pedesaan, pemerintah perlu memperhatikan dan menggali informasi mengenai kondisi serta kebutuhan spesifik setiap daerah. Pengakuan terhadap permasalahan lokal menjadi langkah awal yang krusial untuk merumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif merupakan elemen kunci dalam proses pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, akan lebih mudah mencapai hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi setempat.

Keterlibatan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama membentuk fondasi utama yang mendukung terciptanya pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Koordinasi antara pihak pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya, regulasi, dan kebijakan yang mendukung pembangunan pedesaan. Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat memastikan bahwa program-program yang diimplementasikan tidak hanya memenuhi kebutuhan umum, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kearifan lokal.

Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya kolaborasi dan keterlibatan semua pihak menjadi esensial. Hanya dengan kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dapat terwujud. Hal ini menciptakan lingkungan di mana pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya, dan lingkungan, sehingga dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat pedesaan.

Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan dalam program pembangunan, tetapi juga melibatkan pengidentifikasi masalah dan potensi di masyarakat. Peran partisipasi sangat penting dalam meningkatkan kemampuan individu yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pembangunan. Hal ini tercapai dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan berbagai kegiatan yang mengikuti. Dalam konteks ini, prinsip "*bottom-up*" yang terlihat dalam pengelolaan dana desa mencerminkan adopsi prinsip-prinsip pembangunan dari tingkat paling bawah. Pendekatan ini sesuai dengan konsep teori pembangunan dari bawah ke atas yang menekankan bahwa pembangunan yang berhasil dimulai dengan pemahaman dan tanggapan terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat lokal (Hatu et al. 2024).

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pedesaan mencerminkan rasa kepedulian, kesediaan, dan kemauan mereka untuk berkorban serta memberikan kontribusi dalam menjalankan program-program di wilayahnya. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas masyarakat melalui penyediaan pendidikan dan pelatihan yang inklusif, sehingga mereka dapat memahami serta mengatasi berbagai dinamika dan tantangan pembangunan. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan sinergi yang efektif guna mencapai tujuan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

Menurut penjelasan dari salah satu aparat Desa Mongolato, bahwa tahapan perencanaan program dimulai dengan rapat Musrenbangdes, di mana masyarakat menyuarakan aspirasi. Namun, sebelumnya, kepala-kepala dusun melakukan observasi di masing-masing dusun

untuk mengetahui keluhan atau kebutuhan masyarakat. Hal demikian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan di Desa Mongolato sangat ditekankan. Rapat Musrenbangdes menjadi panggung utama di mana aspirasi masyarakat dapat diungkapkan secara langsung.

Sebelum tahap ini dilaksanakan, kepala dusun menjalankan observasi di wilayah masing-masing untuk mengidentifikasi keluhan atau kebutuhan yang mungkin belum tersampaikan. Tindakan ini mencerminkan kesungguhan pemerintah desa untuk merespons kebutuhan nyata dan merangkul partisipasi aktif warga dalam menggagas solusi untuk perbaikan. Dengan demikian, proses perencanaan program di Desa Mongolato diawali dengan tahapan yang melibatkan masyarakat secara proaktif, menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat setempat. Hal ini memberi dampak terhadap pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Bentuk-Bentuk Program Dari Implementasi Penggunaan Dana Desa

Berbagai bentuk program dari implementasi penggunaan dana desa telah dirasakan oleh masyarakat, dimana masyarakat merasa puas atas implementasi prorgam pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum merasakan manfaat nyata dari berbagai program yang diimplementasikan dengan menggunakan dana desa. Adanya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintah desa menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil telah memberikan dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan mereka. Penggunaan dana desa dengan berbagai bentuk program pembangunan telah menciptakan perubahan positif dalam infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor kunci lainnya di lingkungan desa. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi program-program tersebut dapat dianggap sebagai upaya kolaboratif yang berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan desa secara keseluruhan.

Peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan derajat hidup masyarakat di pedesaan dapat diwujudkan melalui implementasi kebijakan Dana Desa. Oleh karena itu, seharusnya Dana Desa terus dialokasikan hingga pedesaan benar-benar mencapai tingkat kemandirian, dengan penduduknya yang berpendidikan, sejahtera, dan mampu mengembangkan desanya melalui program pembangunan yang telah diterapkan. Melalui pemberdayaan masyarakat, diharapkan bahwa penduduk pedesaan dapat meningkatkan martabatnya sebagai individu mandiri, mengatasi stigma kemiskinan yang melekat akibat kondisi masa lalu, dan mencapai kesejahteraan. Dukungan terhadap kebijakan Dana Desa dianggap sebagai langkah yang pantas untuk mendukung upaya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan, dengan harapan dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan (Sumarto and Dwiantara 2019).

Sejalan dengan uraian di atas, keterlibatan pihak lain juga memiliki peran penting, seperti yang dinyatakan oleh Barraket et al. (2017). Mereka menunjukkan bahwa peran positif dari organisasi pemerintah dan kewirausahaan sosial berdampak pada desa, terutama dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memberdayakan diri. Melibatkan berbagai pihak dan meningkatkan kapasitas masyarakat di desa sebagai subjek pembangunan digunakan untuk mendukung pengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam desa, dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa. Seiring berjalannya waktu, berbagai strategi dan model pembangunan desa muncul. Di Indonesia, program pembangunan desa telah diimplementasikan dengan berbagai model.

Merujuk pada hasil wawancara di lapangan, diketahui bahwa mayoritas masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintah desa, sebagaimana tercermin dalam sejumlah respons positif

dari wawancara dengan enam narasumber yang mewakili masing-masing dusun. Meskipun hanya satu dari mereka menyampaikan tanggapan negatif terkait penyaluran bantuan, setelah ditelusuri, ternyata informan tersebut jarang sekali mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, sehingga muncul berbagai persepsi negatif dari informan tersebut. Namun, menurut peneliti, tanggapan ini perlu menjadi catatan penting bagi pemerintah Desa Monggolato, agar lebih pro-aktif lagi dalam agenda-agenda perencanaan pembangunan ke depannya.

Beragam respons masyarakat terhadap perubahan dan implementasi dana desa juga terungkap dalam wawancara dengan beberapa informan, di mana sebagian besar masyarakat menyatakan rasa syukur mereka atas kemudahan yang diberikan melalui program-program tersebut, yang mempermudah kegiatan sehari-hari dan berkontribusi pada perekonomian. Meski begitu, ada pula yang kurang menyukai program tersebut dengan alasan bahwa bantuan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Namun, dari wawancara dengan sejumlah penerima manfaat, terlihat bahwa bantuan meliputi berbagai hal, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan bibit pertanian, bantuan bibit ternak ayam Boiler sebanyak 20 ekor, program Rumah Mahyani, MCK, dan beberapa bantuan lainnya.

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dana desa melalui program-program pemberdayaan masyarakat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mendukung keberlangsungan hidup dan perkembangan masyarakat desa. Dengan demikian, program ini menjadi salah satu aspek penting dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Dengan melibatkan masyarakat desa secara aktif, program pemberdayaan masyarakat dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program ini sangat diperlukan guna mencapai hasil yang maksimal dalam mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

Perihal program pembangunan, pemerintah Desa Mongolato juga telah melaksanakan beberapa program pembangunan yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, salah satunya adalah infrastruktur jalan. Merujuk hasil wawancara di lapangan, diketahui bahwa masyarakat Desa Mongolato mayoritas petani dengan komoditas pertaniannya adalah padi. Pembangunan jalan pertanian memberikan dorongan semangat kepada petani, karena akses ke lahan pertanian menjadi lebih mudah dengan adanya akses jalan yang memadai. Pembangunan jalan ini juga membantu mengurangi biaya untuk menyewa buruh karena petani tidak perlu lagi mengangkut gabah padi secara jauh-jauh. Keseluruhan pembangunan jalan pertanian ini sejalan dengan konsep penyesuaian kebutuhan masyarakat di mana kebutuhan akan fasilitas jalan yang memudahkan aktivitas pertanian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemerintah Desa Mongolato memiliki komitmen yang kuat terhadap pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani. Selain infrastruktur jalan, pemerintah desa juga telah melaksanakan berbagai program pembangunan lainnya yang memberikan dampak positif. Dengan fokus pada sektor pertanian, pembangunan jalan pertanian telah menjadi salah satu tonggak utama dalam upaya peningkatan kualitas hidup para petani di Desa Mongolato.

Pentingnya pembangunan jalan pertanian juga tercermin dalam pengurangan biaya operasional para petani. Sebelumnya, mereka mungkin harus menyewa buruh untuk membawa gabah padi secara jauh-jauh, yang tentu saja memerlukan biaya tambahan. Dengan adanya akses jalan yang baik, biaya tersebut dapat diminimalkan, memberikan efisiensi dalam proses distribusi hasil pertanian. Hal ini sejalan dengan konsep penyesuaian kebutuhan

masyarakat, di mana fasilitas jalan yang memadai menjadi kunci untuk mendukung dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Keseluruhan, pembangunan jalan pertanian di Desa Mongolato tidak hanya sekadar proyek fisik, tetapi juga merupakan implementasi dari visi pemerintah desa untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya. Keberhasilan program ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memahami dan memenuhi kebutuhan nyata masyarakat, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah dibahas di atas, peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi aktif masyarakat, perencanaan yang matang, dan implementasi program pembangunan secara efektif menjadi kunci dalam mencapai pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Implementasi kebijakan Dana Desa melalui berbagai program memberikan dampak positif yang signifikan pada kesejahteraan dan pembangunan masyarakat desa di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Respon positif pun muncul dari beberapa informan yang telah diwawancarai, meskipun ada juga informan yang memberi respon negative terhadap implementasi program yang telah dilaksanakan pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Afandi, M. I., and Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik* 6(2):92–113.

Akhmad, A., I. Gani, and S. Amalia. (2019). Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sepatin Di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 4(3):120–29.

Barraket, Heather Douglas, Robyn Eversole, Chris Mason, Joanne McNeill, and Bronwen Morgan. (2017). Classifying Social Enterprise Models in Australia. *Social Enterprise Journal* 13(4):345–61. doi: https://doi.org/10.1108/SEJ-09-2017-0045.

Hatu, Rauf. A., R. Ibrahim, S. Bumulo, and F. .. Adahati. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desadi DesaBiluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. *Dynamics of Rural Society Journal* 2(1):1–10.

Magal, P., G. M. V Kawung, and M. T. B. Maramis. 2021. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 9(1):462–69.

Salim, A. 2002. *Perubahan Sosial Sketsa Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sembel, T., R. Gosal, and S. Pangemanan. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Ekstekutif* 1(1).

Soleh, Ahmad. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai* 5(1):32–52.

Sumarto, R. H., and L. Dwiantara. (2019). Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf

Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Publicuho* 2(2):65–74.

Tahulending, R., M. Kaunang, and I. Sumampouw. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrembang) Di Desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat. *Jurnal Eksekutif* 1(1).

Telaumbanua, A., and N. Ziliwu. (2022). Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntasi, Manejemen, Dan Ekonomi* 1(1):108–23.

Tohopi, R., Y. N. Nani, F. P. Tui, and J. Abdussamad. (2024). Tata KelolaKebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Kultural Masyarakat Desa Di Kabupaten Boalemo. *Dynamics of Rural Society Journal* 2(1):11–21.